

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan yang baik (*good goernance*) berbasis kearifan lokal penting untuk dilakukan penelitian karena sejumlah alasan. *Pertama*, buruknya citra pemerintahan dikalangan masyarakat yang diakibatkan maraknya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dikalangan pejabat pemerintah. *Kedua*, maraknya praktek tersebut menjadikan meningkatnya ketidakpercayaan publik pada pemerintah baik pusat maupun daerah. *Ketiga*, munculnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah menjadikan munculnya rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, adanya tarik-menarik antara kepentingan nasional disatu sisi dengan kepentingan global disisi lain memerlukan adanya penguatan jatidiri bangsa untuk dapat menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius semua pihak.

Karena itu, salah satu isu yang digulirkan pemerintah pasca reformasi adalah pelaksanaan konsep *good governance* dalam pembangunan bangsa. Mardiasmo (dalam Tangkilisan, 2005, hlm. 114) menjelaskan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Sedarmayanti (2009) menjelaskan bahwa:

ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintah dipicu oleh penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, represif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (hlm, 271).

Berangkat dari pendapat di atas, maka kesalahan-kesalahan dalam manajemen pemerintahan berimplikasi pada munculnya ketidakpercayaan masyarakat akan kinerja pemerintah. Karena itu, muncullah berbagai inisiatif untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dari mulai tingkat lokal sampai nasional.

Penerapan kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk inisiatif yang dilandasi keinginan kuat mempercepat proses pembangunan nasional dalam prakteknya tidak secara spontan dapat memenuhi sisi ideal yang diharapkan, hal tersebut amat bergantung pada keberhasilan setiap elemen daerah dalam menjalankan konsepsi sebagaimana yang dicanangkan. Pemerintah yang meliputi kepala daerah dan perangkatnya (SKPD), DPRD serta masyarakat harus senantiasa berkerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan moral yang berkembang dimasyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai hangat diperbincangkan sejak awal tahun 2001, secara filosofis dapat dilihat sebagai bagian dari suatu proses perubahan menuju kemandirian daerah dalam pembangunan. Akan tetapi, apabila proses perubahan tersebut hanya ditumpukan pada Pemerintah Daerah maka dapat dipastikan demokrasi tidak akan pernah terwujud. Karena itu, untuk mendukung ketercapaian pembangunan di era otonomi daerah diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan. Dijelaskan Dijelaskan Sedarmayanti (2012, hlm. 3) bahwa:

pemerintahan yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, yakni warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.

Berangkat dari pendapat di atas, maka kolaborasi dan sinergitas antara masyarakat dan pemerinatah amat diperlukan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, kebijakan desentralisasi pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan hal tersebut.

Desentralisasi yang merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Ayat 4 UU No 24

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai potensi terciptanya transparansi dan akuntabilitas serta menjadi modal tumbuhnya demokrasi di daerah. Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa kebijakan ini di dalamnya tidak secara otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena belum mampu secara optimal membuka peran serta masyarakat dalam praktek pemerintahan. Mengacu pada pendapat Sedarmayanti (2009, hlm. 270) bahwa potensi demokratisnya desentralisasi sangat mungkin tercapai apabila terdapat institusionalisasi peran serta masyarakat di tingkat lokal, jika tidak maka pemerintah yang terdesentralisasi dapat mengakibatkan kalangan elit lokal mendapatkan kekuasaan baru dan berpotensi mendapat keuntungan bagi dirinya.

Partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan merupakan hal penting sebagai cermin perjalanan demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi publik kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pentingnya partisipasi publik pada gilirannya memperoleh momentum yang tepat seiring berkembangnya otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan dan merepresentasikan harapan masyarakat. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pemerintahan yang baik tidak dapat tercapai tanpa didukung oleh keberadaan masyarakat yang kuat sebagai modal sosial paling utama.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah. Sebagaimana Bastian (2006, hlm. 338) yang menjelaskan bahwa tujuan program otonomi daerah adalah menciptakan kehidupan politik yang lebih demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi.

Lusiana Rahmawati, 2015

PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Akan tetapi, harapan-harapan sebagaimana diungkap di atas sampai saat ini masih menemui berbagai kendala. Hal tersebut didasarkan pada hasil pengamatan dan telaah terhadap beberapa informasi yang diperoleh dari media massa dan beberapa referensi ditemukan sejumlah masalah dalam kaitannya dengan pemberlakuan otonomi daerah. Pertama, otonomi daerah berdampak pada munculnya “raja-raja kecil” yang seakan menguasai daerah yang dipimpinnya. Kedua, pemahaman Pemerintah Daerah mengenai konsepsi otonomi daerah masih kurang. Ketiga, adanya tindakan sewenang-wenang dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Keempat, terjadinya perebutan batas wilayah antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya yang berujung pada konflik vertikal maupun horizontal. Kelima, pembangunan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang ada di daerah.

Asumsi demikian senada dengan pendapat Ihsan (2011, hlm. 12) dalam papernya “perlunya percepatan pembangunan di era otonomi daerah” yang menjelaskan sejumlah permasalahan dalam otonomi daerah di Indonesia, sebagai berikut:

1. Munculnya penguasa baru di wilayah NKRI,
2. Adanya eksploitasi pendapatan daerah,
3. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap,
4. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai,
5. Kondisi aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah,
6. Banyaknya korupsi di daerah, dan
7. Adanya potensi munculnya konflik antardaerah

Melihat adanya ketimpangan antara *das sollen* (harapan) dan *das sein* (kenyataan) sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu kiranya dilakukan sebuah langkah lanjutan untuk menemukenali permasalahan yang secara faktual muncul ke permukaan sampai dapat menemukan solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan yang ditemui tersebut. Munculnya penguasa-penguasa baru pasca diberlakukannya otonomi daerah atau yang oleh peneliti disebut sebagai “raja-raja kecil” sebenarnya merupakan hal yang tidak semestinya terjadi jika pemahaman akan konsepsi otonomi daerah sudah mencapai titik maksimal.

Sekalipun terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, tidak lantas diakui adanya kedaulatan pada daerah karena sebagai negara yang didasarkan atas prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan nasional. Karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan akan tetap ada ditangan pemerintah pusat. Sekaitan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Poin penting yang menjadi pembedanya terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Maka dengan demikian, daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Tuntutan *good governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi sangat identik dengan adanya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan tujuan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Sekaitan dengan itu, dijelaskan Sedarmayanti (2003, hlm. 2) bahwa perlu diperhatikan mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas karena pada dasarnya terdapat tiga pilar utama dalam mewujudkan *good governance*, meliputi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

Isu *governance* mulai memasuki perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh adanya dinamika yang menuntut adanya perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta maupun masyarakat. Peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam komunitas masyarakat dan sektor swasta ikut untuk aktif melakukan upaya tersebut.

Sebagian besar otonomi daerah (tugas dan kewenangan mengatur daerah sendiri) diberikan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota atas dasar pertimbangan budaya, politik (demokrasi), dan ekonomi lokal. Perubahan atau pergeseran pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik dalam Undang-undang membawa dampak yang sangat signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki kemajemukan, karakteristik, sosial, budaya, adat, letak geografi dan wilayah serta kemampuan daerah yang berbeda-beda.

Malau (2013, hlm. 3) menjelaskan tujuan utama penerapan otonomi daerah adalah:

Pertama, adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pemerintahan daerah. Kedua, memiliki sistem pemerintahan yang lebih responsif dan representative. Ketiga, lebih demokratis di tingkat lokal dalam menampung aspirasi masyarakat lokal. Keempat, untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah sebagai tujuan bangsa dan negara.

Menilik penjelasan tersebut, maka penciptaan *good governance* dalam kerangka otonomi daerah memberikan porsi yang besar bagi masyarakat lokal disertai dengan nilai-nilai budaya dan adat kebiasaan yang dimilikinya untuk berkontribusi atau bahkan menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Implementasi *good governance* bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis *local wisdom* sebagai tujuan *governance* akan memberikan warna *the ultimate goal of autonomy* dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Kita mengetahui dengan pasti bahwa kearifan lokal merupakan suatu kecenderungan umum masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah sebagai pilihan politik terbaik, dimana pemerintah bersama masyarakat bersatu-

Lusiana Rahmawati, 2015

PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

padu membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan pembangunan memberikan makna bagi perjuangan daerah untuk mencapai prestasi terbaik. Indonesia sebagai negara yang kaya akan ragam budaya masyarakat mempunyai ratusan suku yang tersebar dari Sabang sampai Merauke yang pada akhirnya merujuk pada satu kebudayaan nasional dan menjadikannya sebagai identitas diri bangsa Indonesia.

Berbicara mengenai karakteristik masyarakat, tidak hanya terbatas pada pembicaraan mengenai kekayaan budaya bangsa melainkan lebih ditekankan pada saratnya nilai-nilai kebijaksanaan dan kebaikan yang tercermin pada setiap praktik kehidupan sehari-hari. Kebudayaan lokal atau dalam konteks penelitian ini disebut dengan istilah kearifan lokal lahir karena pengaruh sejarah dan kebiasaan masa lalu yang berjalan secara sistematis dan turun-murun. Kandungan nilai dalam setiap budaya masyarakat menjadikannya harus dipertahankan bahkan menjiwai setiap derap langkah masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Daya dukung kearifan lokal dalam meningkatkan pembangunan dan kemajuan bangsa semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pemahaman tersebut senada dengan Saini (dalam Suryadi & Kusnandi, 2010, hlm. 602) yang menjelaskan kearifan lokal sebagai sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Karena itu, bicara mengenai kearifan lokal maka akan bertuju pada tatanan nilai moral budaya suatu masyarakat.

Kearifan lokal sebagai bagian dari konstruksi budaya dijelaskan Haba (2007, hlm. 330) mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Indonesia sebagai salah satu Negara besar dengan beragam

warisan kebudayaan yang memiliki peran yang cukup penting dalam memindahkan unsur-unsur kebudayaan dari generasi ke generasi penerus guna memelihara identitas dan melawan pengaruh *westernisasi* (budaya barat) yang semakin gencar menyelimuti segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dengan kembali pada nilai kearifan lokal sebagai budaya asli masyarakat serta kembali mempelajari dan memahami kearifan lokalnya dengan harapan bahwa pada masa depan masyarakat akan mendapat kesesuaian hidup dan pandangan secara luas bahwa kearifan lokal sangatlah penting untuk keseimbangan hidup di masa yang akan datang dan bisa dipahami secara menyeluruh oleh lapisan masyarakat Indonesia akan pentingnya menanamkan dan mengenal kembali nilai kearifan lokal.

Adanya desakan dan pengaruh budaya asing dalam iklim globalisasi menjadikan pentingnya menjaga dan memperkuat kearifan lokal yang sarat nilai dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Salah satu daerah yang mereduksi kearifan lokal dalam menjalankan pembangunannya adalah Kabupaten Purwakarta yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Dimana sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, Kabupaten Purwakarta memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kualitas di semua sektor bidang melalui kearifan lokal sebagai basis untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang tentunya melibatkan semua instansi pemerintahan, aparatur daerah juga masyarakat untuk membangun daerahnya menjadi lebih baik.

Sebagaimana dijelaskan Mulyadi (tersedia dalam <http://www.purwakartakab.com> diakses tanggal 15 Maret 2015) bahwa pembangunan di Kabupaten Purwakarta dilakukan atas dasar kearifan lokal yang menghargai alam, menyantuni alam, dan mengikuti pola kerja alam. Melalui program “berseka” nya Mulyadi menjelaskan bahwa alam adalah rumah bagi setiap insan manusia, bahkan dapat dikatakan sebagai sumber hidup manusia karena tanpa alam maka tidak akan ada kehidupan. Dilain pihak dikemukakan oleh Mulyadi bahwa keberpihakan dirinya pada tradisi, bukan dengan niatan menolak agama sebagai

basis kehidupan. Ia percaya bahwa agama merupakan keyakinan, sedangkan tali paranti karuhun adalah cara yang menggenapi syariat agama.

Kearifan lokal yang menjadi basis pembangunan di Kabupaten Purwakarta berangkat dari budaya Sunda sebagai karakteristik masyarakat Jawa Barat yang sarat akan nilai. Dikatakan demikian karena berdasarkan pandangan yang dijelaskan Rosidi (2010, hlm. 50) bahwa:

pandangan hidup orang Sunda menganjurkan agar rukun, mendahulukan kebersamaan (karageman), mempunyai pertimbangan yang adil, mempunyai pandangan kedepan sehingga selalu siap kalau pada suatu waktu menghadapi kesukaran, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, harus bijaksana sehingga dapat mencapai hasil tanpa menimbulkan ketegangan atau kekeruhan, suka tolong-menolong, hemat serta pandai mengatur rizki, tahu diri, tahu aturan, kalau berkata tidak sembarangan sehingga tak mudah berubah-ubah, sabar dan tekun dalam mengerjakan sesuatu dan lain-lain.

Mengacu pada argumen di atas, maka jelas bahwa kearifan lokal budaya Sunda sebagai basis pembangunan daerah amat relevan dengan upaya pencapaian suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena tidak satupun nilai yang terkandung di dalamnya bertentangan dengan nilai-nilai etika dan keutamaan. Selain itu, kearifan lokal dapat pula dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam menghadapi berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat karena kita sadari betul bahwa kondisi sosial kultural masyarakat yang beragam amat potensial terjadinya konflik.

Hal tersebut dijelaskan Haba (2007, hlm. 334-335) berdasarkan inventarisasi kearifan lokal dan signifikansinya dengan salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, *local wisdom* akan mengubah pola pikir, dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebuah

mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh diatas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui observasi, ditemukan bahwa pengelolaan pembangunan berbasis kearifan lokal di Kabupaten Purwakarta selain memberikan nuansa “nyentrik” jika dilihat dari sisi infrastruktur tata ruang kota, juga dinilai mengingatkan akan sejarah dan jatidiri masyarakat Sunda yang sauyunan. Selain itu, tulisan-tulisan yang menghiasi beberapa gapura di Kabupaten Purwakarta menggunakan bahasa Sunda telah mengingatkan kita mengenai arti penting melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa.

Akan tetapi, bicara kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini bukan hanya yang simbolik terlihat dari bentuk dan arsitektur bangunan semata, melainkan lebih kepada pelestarian nilai-nilai adiluhung sebagai ciri karakteristik orang Sunda yang patut diteladani. Karena itu, pembangunan daerah berbasis kearifan lokal bukan terletak pada pembangunan fisik saja melainkan lebih kepada pembangunan sumber daya manusia Sunda yang berkualitas yang pada akhirnya mampu mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dijelaskan Rosidi (2010, hlm. 23) bahwa masyarakat Sunda adalah yang paling lama dijajah oleh Belanda, oleh karenanya amat kental dengan budaya feodal yang selalu menempatkan diri berada di bawah. Istilah “*heurin ku letah*” merupakan salah satu implikasi dari kentalnya budaya feodal di kalangan masyarakat Sunda, yang menunjukkan adanya ketakutan terhadap penguasa sehingga tidak adanya keberanian untuk mengemukakan pikiran dan atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hal demikian itu, merupakan sesuatu yang amat dihindari dalam iklim demokrasi yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pengutamaan pembangunan mentalitas dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kearifan lokal harus mampu menjadi cikal bakal pembangunan bangsa dan negara yang demokratis karena dilain pihak orang Sunda dikenal dengan karakternya yang mendahulukan kebersamaan

(karagaman). Hal ini penting dikembangkan, karena pembangunan hanya akan tercapai dengan mudah apabila ada sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Urgensi pentingnya dikembangkan pembangunan yang berorientasi pada manusia dijelaskan Rosidi (2010, hlm. 24) bahwa pembangunan daerah harus mengutamakan pembangunan manusia. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sosok manusia Sunda yang diperlukan dalam pembangunan ialah manusia kreatif yang berani mengemukakan keyakinan dan menuntut haknya di pihak rakyat dan manusia yang menganggap jabatan yang dipercayakan kepadanya bukan sebagai alat untuk memperlihatkan kekuasaan secara sewenang-wenang, melainkan sebagai amanat yang harus dilaksanakan penuh pengabdian pada masyarakat di pihak elit politik dan elit pelaksana administratif.

Mengacu pada pemikiran diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam ikhwal tata kelola pemerintahan yang menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis pembangunannya. Karena itu, penulis mengangkat hal tersebut ke dalam suatu studi penelitian dengan judul **“Penguatan Nilai Kearifan Lokal sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta)”**. Penelitian ini dinilai penting karena pada hakikatnya pembangunan nasional di era otonomi daerah harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di daerah-daerah otonom untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini antara lain : *Pertama*, perjalanan demokrasi tidak dibarengi dengan upaya maksimal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik; *Kedua*, masih rendahnya kepercayaan masyarakat bahwa kebijakan otonomi daerah dinilai dapat mempercepat proses pembangunan (munculnya “raja-raja kecil”); *Ketiga*, tergerusnya nilai-nilai kesundaan yang ada

Lusiana Rahmawati, 2015

PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dalam masyarakat seiring terjadinya tarik-menarik antara nilai-nilai lokal dan global; *Keempat*, peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan berbasis potensi dan kondisi sosial kultural masyarakat masih minim yang artinya bertolak belakang dengan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. *Kelima*, berpikir global dan berperilaku lokal (*think globally, act locally*) yang sering digemborkan para pemikir, pemerhati dan praktisi pendidikan kewarganegaraan dalam menjawab tantangan global masih sebatas konsep semata. Oleh karena itu, fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah penguatan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Perumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diidentifikasi di atas, maka penulis merincinya ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi tata kelola pemerintahan berbasis nilai kearifan lokal dalam kaitannya dengan pandangan hidup orang Sunda?
- b. Sejauhmana relevansi nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?
- c. Tantangan apa sajakah yang dihadapi dalam menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditengah terpaan arus globalisasi?
- d. Bagaimana model alternatif penguatan nilai kearifan lokal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis penguatan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang pada akhirnya hasil penelitian tersebut dapat digunakan oleh para pemerhati, pengembang dan para pemangku kebijakan dalam menumbuhkembangkan nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mendukung perjalanan demokrasi di Indonesia.

Lusiana Rahmawati, 2015

PENGUATAN NILAI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendeskripsikan implementasi tata kelola pemerintahan berbasis nilai kearifan lokal dalam kaitannya dengan pandangan hidup orang Sunda.
- b. Mengkaji dan menganalisis relevansi nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- c. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditengah terpaan arus globalisasi.
- d. Merancang suatu model alternatif penguatan nilai kearifan lokal dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam bidang politik dan kebijakan publik yang menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah, sebagai masukan dalam penyusunan *master plan* pembangunan daerah yang menempatkan nilai kearifan lokal sebagai basis tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan sebagai stimulus mengenai pentingnya mengembangkan dan membudayakan nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari sebagai cermin bangsa yang berbudaya dan berkarakter, sehingga nilai lokal dapat terpelihara dan menjadi penyaring terhadap pengaruh global yang masuk secara masif.

- c. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya terutama bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian mengenai pengembangan nilai kearifan lokal (*local wisdom*).

E. Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, merupakan alasan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) Latar belakang penelitian, b) Identifikasi dan perumusan masalah, c) Tujuan penelitian, d) Manfaat penelitian dan e) Struktur organisasi tesis.
- Bab II Kajian Pustaka, mempunyai peran yang sangat penting karena merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan dalam penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) Paradigma tentang kearifan lokal, b) Kajian tentang nilai budaya dan makna kasundaan, c) Hakikat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), d) Kerangka pemikiran dan e) Penelitian terdahulu.
- Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjabaran secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) Lokasi dan subjek penelitian, b) Desain penelitian dan justifikasi penggunaan desain tersebut, c) Metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode tersebut, d) Definisi operasional, e) Instrumen penelitian, f) Teknik pengumpulan data serta g) Teknik pengolahan dan analisis data.
- Bab IV Temuan dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang di peroleh di lapangan untuk kemudian di analisis menggunakan berbagai teori yang relevan. Isi dari bab ini meliputi; a) Gambaran umum lokasi penelitian, b) Deskripsi hasil penelitian dan c) Analisis hasil penelitian.
- Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, merupakan jawaban dari aspek yang di teliti.